

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan mutlak sangat diperlukan, karena semua kegiatan operasional yang dijalankan dan kinerja sangat membutuhkan kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan mampu memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yang telah dibuat.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan *good corporate governance*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Daniri bahwa "keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan yaitu faktor eksternal dan faktor internal."<sup>1</sup> Faktor Eksternal yang mempengaruhi *good corporate governance* antara lain adanya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi

---

<sup>1</sup> Daniri, "*Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*", (Jakarta: PT Trixs Trimacindo, 2005), hal. 153

hukum yang konsisten dan efektif, adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan, adanya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan profesional, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat serta adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan, adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan perusahaan oleh seorang pemimpin yang mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*, adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan atau sistem pengendalian internal, terdapatnya sistem audit yang efektif, adanya keterbukaan informasi bagi publik serta adanya pemimpin dan anggota yang berkualitas, memiliki *skill*, kredibilitas dan integritas untuk menggerakkan perusahaan.<sup>2</sup>

Sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 16

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission*) pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.<sup>4</sup> Menurut Aries, pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>5</sup>

Penelitian Gusnardi yang berjudul “Pengaruh Peran Pengendalian Internal, Audit Internal, Komite Audit dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud” menyatakan bahwa pengendalian internal dapat memberikan jaminan dalam keandalan pelaporan keuangan, efisien dan operasi yang efektif dan sesuai dengan aturan dan peraturan. Oleh karena itu, jika pengendalian internal dalam organisasi berjalan dengan baik maka praktek *good corporate governance* yang baik akan terwujud.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

<sup>4</sup> Krismiaji, “*Sistem Informasi Akuntansi*”, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), hal. 147

<sup>5</sup> Mulyadi, “*Sistem Akuntansi, Edisi 3*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 165

<sup>6</sup> Gusnardi, “Pengaruh Peran Pengendalian Internal, Audit Internal, Komite Audit, dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*”, *Jurnal Ekuitas*. Vol 15 No. 1 Maret 2011

Gaya kepemimpinan (*leadership style*) adalah suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya. Secara relatif ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokratis, demokratis atau partisipatif dan *laissez-faire*, yang semuanya pasti memiliki kelemahan-kelemahan dan keuntungannya. Perbedaan gaya kepemimpinan dalam organisasi akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok.<sup>7</sup> Sebagai contoh, partisipasi dalam pengambilan keputusan pada gaya kepemimpinan demokratis akan mempunyai dampak pada peningkatan hubungan manajer dengan bawahan, menaikkan moral dan kepuasan kerja dan menurunkan ketergantungan terhadap pemimpin.<sup>8</sup>

*Good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik apabila suatu entitas memiliki seorang pemimpin yang mampu berinteraksi dengan baik kepada seluruh jajaran karyawan di dalam perusahaan. Pemimpin adalah jembatan yang menghubungkan antara pihak *stakeholders* dan pihak *stakeholders* yang lainnya, oleh karena itu seorang pemimpin mempunyai andil dalam menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan. Organisasi yang memperlihatkan kehebatannya dalam *corporate governance* mempunyai pemimpin yang mampu berinteraksi dengan baik kepada seluruh jajaran karyawan di dalam perusahaan. Keberhasilan penerapan *good corporate governance* terletak

---

<sup>7</sup> Jarwanto, “*Pengantar Manajemen (3 IN 1)*”, (Yogyakarta: Mediatara, 2015), hal. 94

<sup>8</sup> Topan, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, *Skripsi Publikasi: Program Studi Keuangan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016*

pada kepemimpinan yang kuat, tangguh dan mempunyai daya tahan untuk bekerja dalam organisasi maka akan semakin mendorong keberhasilan penerapan *good corporate governance*.<sup>9</sup>

Budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi atau falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan atau cara pekerjaan dilakukan di tempat kerja atau asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi.<sup>10</sup> Penelitian Widuri dan Paramita menyatakan bahwa budaya organisasi dikatakan baik apabila budaya organisasi dapat diterima secara luas oleh para karyawan atau anggota di dalam organisasi tersebut dan dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Untuk mewujudkan penerapan *good corporate governance* yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, diperlukan budaya organisasi yang baik untuk mendukung pelaksanaannya. Budaya organisasi yang dapat mendukung adalah budaya organisasi yang tertanam secara kuat di dalam organisasi. Karena semakin kuat budaya organisasi yang ditanamkan dalam suatu perusahaan atau organisasi maka akan semakin baik penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan atau organisasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lestariningsih, "Peranan Penerapan *Good Governance* dalam Pengembangan Perusahaan Publik", *Jurnal Spirit Publik Vol. 4 No. 2* 2008

<sup>10</sup> Siswanto dan Agus Sucipto, "*Teori dan Perilaku Organisasi Tinjauan Integratif*", (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 141

<sup>11</sup> Rindang Widuri dan Asteria Paramita, "Analisis Hubungan Peranan Budaya Perusahaan terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Aneka Tambang Tbk", *Journal The Winners, Vol. 8 No. 2*, September 2007, hal. 126-138

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena di dalamnya yang pertama, yaitu *governance*, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat secara luas sebagai *stakeholders*. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggapan bahwa pemerintah sendiri dirasakan tidak memadai, mengingat kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya perubahan praktik pemerintahan dari yang semula didominasi oleh pemerintah menjadi sebuah tata pemerintahan yang membagi otoritas antara pemerintah dan masyarakat secara proporsional.<sup>12</sup>

*Good governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk sebagian masyarakat Indonesia. Meski memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang *good governance*, sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan penerapan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik.<sup>13</sup> Salah satu permasalahan yang kerap kali menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yakni dalam bidang keuangan. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas dan

---

<sup>12</sup> Dwiyanto dkk, "*Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*", (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), hal. 3 -4

<sup>13</sup> Masnun, "*Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi*". *Jurnal EKONOMIS*. Vol.2 No.1 Maret 2018, hal 175

adanya visi. Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* termaktub dalam QS. Al-Hajj (18: 41) yang berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj 22: 41)<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas *governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan sholat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada ayat di atas terdapat tiga aspek *governance*, yaitu *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*, untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik.

*Good corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, "Al Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 518

signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang.<sup>15</sup> Penelitian Adiwiranto dkk menyatakan bahwa keberhasilan penerapan *good corporate governance* diduga tidak dapat tercapai tanpa dukungan budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan pengendalian internal yang jelas dalam organisasi tersebut. Dalam kaitan peran budaya organisasi dan *good governance* dalam meningkatkan kinerja, inti dari *good governance* terletak pada budaya itu sendiri. Dengan demikian dalam implementasinya perlu dikaji mengenai kesiapan dan kondisi budaya organisasi. Dalam upaya peningkatan daya saing sebuah organisasi, terdapat hal-hal yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan pada kondisi tersebut budaya organisasi yang kondusif penting untuk terlaksananya *good governance*.<sup>16</sup>

Mengacu pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban daerah. Sehingga sangat diperlukan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin dan mengendalikan atas kegiatan dari setiap daerah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan awal.

---

<sup>15</sup> Kresnohadi, “*Manajemen Keuangan*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 89

<sup>16</sup> Adiwiranto, Umi Pratiwi dan Nurhikmah, “Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Governance* Serta Implikasinya terhadap Kinerja (Survey pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal)”. *Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman*, 2014



Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) harus memiliki sistem pengendalian internal yang terintegritas dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan termasuk aset tetap daerah Kabupaten Tulungagung agar tujuan kegiatan pengelolaan keuangan terkait aset tetap yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tercapai dari tujuan yang telah dibuat.

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 69/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian setelah sebelumnya memperoleh opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2018.<sup>17</sup>

*Good corporate governance* mengalami peningkatan salah satunya tercermin dari penyajian laporan keuangannya dan tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Hal tersebut tidak akan tercapai tanpa sebuah sistem pengendalian internal yang terintegritas

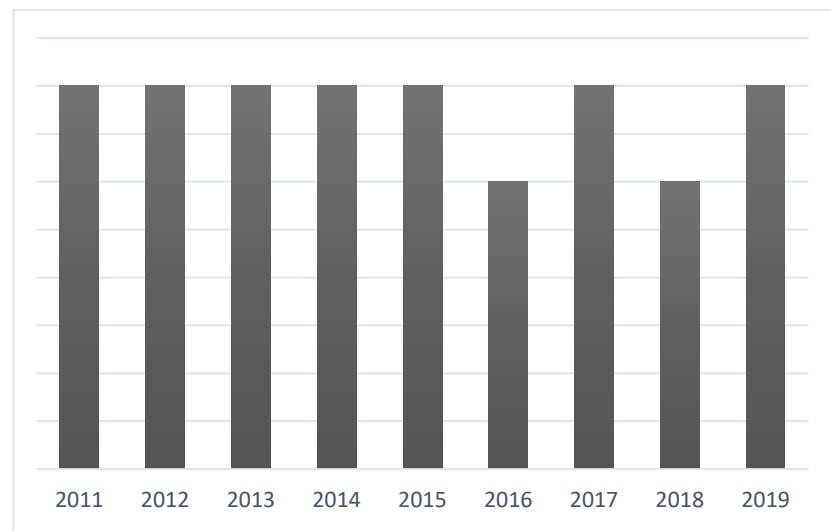
---

<sup>17</sup> BPK RI (*Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*), diakses melalui <http://surabaya.bpk.go.id/kabupatentulungagung>, diakses pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 11:49

dan didukung oleh budaya organisasi serta seorang pemimpin yang mampu berinteraksi dengan baik kepada seluruh jajaran karyawan di dalam perusahaan. Karena bagaimanapun keberhasilan penerapan *good corporate governance* terletak pada kepemimpinan yang kuat, tangguh dan mempunyai daya tahan untuk bekerja dalam organisasi dengan demikian semakin baik kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan arahan untuk dapat mempengaruhi tindakan bawahannya maka akan semakin mendorong keberhasilan penerapan *good corporate governance*.

Berikut adalah perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2019:

Diagram 1. 1  
Perkembangan Opini BPK atas LKPD di Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2011-2019



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Reublik Indonesia, 2019<sup>18</sup>

<sup>18</sup> BPK RI (*Badan Pemeriksa Keuangan Reublik Indonesia*), diakses melalui <http://surabaya.bpk.go.id/kabupatentulungagung>, diakses pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 11:49

Diagram 1.1 diatas menggambarkan perkembangan opini BPK atas LKPD Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2011-2019 dimana pada tahun 2011-2014 LKPD Kabupaten Tulungagung berturut-turut memperoleh opini WTP-DPP (wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas) dan kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi dengan memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi dengan kembali memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi pada tahun 2018 kembali memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) dan tahun terakhir 2019 Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian).

Penelitian yang berkaitan dengan *good corporate governance* memang telah banyak diangkat. Namun penelitian mengenai penerapan *good governance* dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung belum pernah dilakukan. Mengingat bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Tulungagung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan tentunya hal itu tidak terlepas dari peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Peneliti ingin meneliti apakah variabel sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti menentukan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah terkait dengan sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap penerapan *good corporate governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya sebuah sistem pengendalian internal dalam mewujudkan *good corporate governance*, karena sistem pengendalian memberikan jaminan dalam keandalan pelaporan keuangan, efisien dan operasi yang efektif dan sesuai dengan peraturan.
2. Pemimpin mendukung tercapainya sebuah penerapan *good corporate governance*. Baik buruknya sebuah organisasi tergantung pada seorang pemimpin dan gaya kepemimpinannya.
3. Untuk mewujudkan penerapan *good corporate governance* yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, diperlukan budaya organisasi

yang baik untuk mendukung pelaksanaannya.

4. Keberhasilan penerapan *good corporate governance* dalam sebuah organisasi tidak dapat tercapai tanpa dukungan budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan pengendalian internal yang jelas dalam organisasi tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk menguji pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?
4. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi secara simultan terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan pada mata kuliah akuntansi sektor publik tentang pengaruh sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap penerapan *good corporate governance*.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, serta memberikan kesempatan untuk memperluas kajian penelitian berikutnya.

### b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan guna evaluasi lanjuta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan dalam menunjang terwujudnya *good corporate governance*.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan sumber pembanding bagi peneliti selanjutnya.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan pelaksanaan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor

mana saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik. Batasan penelitian ini pengaruh sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap penerapan *good corporate governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Subjek penelitian ini adalah karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

Indikator dari masing-masing variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Pengendalian Internal menggunakan prinsip pengendalian kerangka COSO (*Commitee of Sponsoring Organization of Treadway Commision*) dimana terdapat 5 prinsip yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal.<sup>19</sup>
- b. Gaya Kepemimpinan dapat dinilai dari beberapa indikator meliputi kemampuan pemimpin mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan

---

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf. "Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ", *Tesis Publikasi -Universitas Bina Utama*. Jakarta, 2013, hal. 25



mengendalikan bawahan, tanggungjawab dan kemampuan mengendalikan emosional.<sup>20</sup>

- c. Budaya Organisasi. Indikator yang digunakan dalam budaya organisasi meliputi Inovatif, berorientasi kepada hasil yang akan dicapai berorientasi kepada semua kepentingan karyawan, agresif dalam bekerja, menjaga dan mempertahankan stabilitas kerja.<sup>21</sup>
- d. *Good Corporate Governance* meliputi *transparency* atau keterbukaan informasi, *accountability* atau akuntabilitas, *responsibility* atau pertanggungjawaban, *independency* atau kemandirian dan *fairness* atau kesetaraan dan kewajaran.<sup>22</sup>

## 2. Keterbatasan Penelitian

Penulis membuat batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian variabel independen terhadap variabel dependen yaitu untuk menguji pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal ( $X_1$ ), Gaya Kepemimpinan ( $X_2$ ) dan Budaya Organisasi ( $X_3$ ) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Y). Adapun keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>20</sup> Kartono, Kartini, "*Pemimpin dan Kepemimpinan...*", hal. 32

<sup>21</sup> Manahan P. Tampubolon, "*Perilaku Keorganisasian (Organization Behavior)*"..., hal. 190-193

<sup>22</sup> Rudianto, "*Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan yang Strategis*", (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 133-13

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini:

- a. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya; yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.<sup>23</sup>
- b. Gaya Kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya. Secara relatif ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokrasi, demokratis, atau partisipatif, dan *laissez-faire*, yang semuanya pasti mempunyai kelemahan dan keunggulannya. Perbedaan gaya kepemimpinan dalam organisasi akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok.<sup>24</sup>
- c. Budaya Organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi

---

<sup>23</sup> Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi...*, hal. 147

<sup>24</sup> Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)...*, hal. 94

masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.<sup>25</sup>

- d. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang.<sup>26</sup>

## 2. Definisi Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional variabel penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan terutama yang berkaitan dengan operasional pelaporan informasi dan kepatuhan.
- b. Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini adalah cara pemimpin kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung untuk mempengaruhi bawahannya demi mencapai tujuan organisasi.
- c. Budaya organisasi adalah asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh seluruh anggota organisasi manajemen Badan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>26</sup> Kresnohadi, *Manajemen Keuangan...*, hal. 89

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung yang berkembang dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.

- d. *Good corporate governance* adalah suatu bentuk sistem pengendalian internal atau tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung yang bertujuan untuk mengelola resiko melalui pengamanan aset guna mencapai tujuan organisasi.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut:

**Bagian Awal** yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

**Bagian Utama (Inti)** yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun bagian utama adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan *grand theory* atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel- variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah

**Bagian Akhir** yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.